

KOENTJARANINGRAT DAN INTEGRASI NASIONAL INDONESIA: SEBUAH TELAHAH KRITIS

Heddy Shri Ahimsa-Putra

Departemen Antropologi
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Gadjah Mada
ahimsa_putra@yahoo.com

Abstrak

Dalam artikel ini penulis membahas pemikiran Koentjaraningrat mengenai masalah integrasi nasional, mulai dari awal karir beliau sebagai ahli antropologi, hingga masa pensiunnya. Penulis mengidentifikasi tiga tahap perkembangan pemikiran Koentjara-ningrat mengenai integrasi nasional di Indonesia. Tahap pertama adalah tahun 1970an, yang merupakan masa awal perkembangan pemikiran beliau. Penggunaan konsep-konsep lebih untuk memenuhi keperluan deskripsi daripada analisis. Tahap kedua ada-lah tahun 1980an, ketika Koentjaraningrat mulai lebih analitis dalam memahami masa-lah integrasi nasional, dan identifikasi masalah-masalahnya menjadi lebih tajam dan rinci. Tahun 1990an merupakan tahap perkembangan terakhir, di mana Koentjaraning-rat menggunakan perspektif yang lebih komparatif dan makro untuk memahami feno-mena integrasi nasional. Paparan di sini merupakan hasil kajian pustaka dengan menggunakan metode *content analysis*.

Kata kunci : integrasi nasional; kebudayaan; Koentjaraningrat; Indonesia.

KOENTJARANINGRAT AND INDONESIAN NATIONAL INTEGRATION: A CRITICAL DISCUSSION

Abstract

In this article the author discusses critically Koentjaraningrat's views on national in-tegration in Indonesia since late 1960s until 1990s. The author identifies three phases of development in Koentjaraningrat's analysis and understandings of national integra-tion. The first phase is the years of 1970s, which is the emergence years of Koentjara-ningrat's views on national integration. In this phase his use of concepts related to na-tional integration was more descriptive rather than analytical. The second phase is 1980s, when Koentjaraningrat was more analytical in studying the phenomenon. His analysis was more detailed. The 1990s is the last phase, in which Koentjaraningrat used macro and comparative perspective to understand national integration in Indone-sia. The three phases is the result of the author's analysis of Koentjaraningrat's works using content analysis method to uncover the content and the information within the works.

Keywords : national integration; culture; Koentjaraningrat; Indonesia.

I. PENGANTAR ¹⁾

Di tengah situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang diterpa oleh angin globalisasi budaya yang semakin kencang, kecamuk hoax dan ujaran kebencian yang semakin sering, berita kericuhan sosial yang bermunculan setiap hari dalam media massa dan media sosial, kekhawatiran

¹ Artikel ini merupakan versi yang telah diperbaiki dan dipersingkat dari makalah dengan judul "Integrasi Nasional dan Ancaman yang Dihadapi" yang telah disajikan dalam "Koentjaraningrat Memorial Lecture – 2018", diselenggarakan oleh FKAI berkerjasama dengan Bentara Budaya, di Jakarta, 19 Oktober, dan Yogyakarta, 31 Oktober 2018

dan pertanyaan pun muncul berkenaan dengan integrasi sosial dan integrasi nasional di Indonesia. Akan mampukah Indonesia bertahan sebagai sebuah bangsa? Akan mampukah NKRI mempertahankan eksistensinya di tengah upaya-upaya pihak tertentu untuk melemahkannya? Akan mampukah bangsa Indonesia menjaga persatuan dan kesatuannya? Pertanyaan-pertanyaan bernada pesimis ini rupanya telah mendorong sejumlah pihak untuk menyarankan diangkatnya masalah integrasi nasional, kesatuan bangsa, ancaman disintegrasi dalam berbagai diskusi, talkshow, seminar, konferensi, di kalangan akademisi, birokrasi ataupun aktivis, agar persoalan tersebut dapat dicarikan penyelesaian yang sebaik-baiknya, sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat beragam budayanya.

Bagi kalangan akademisi terutama para ilmuwan sosial seperti ahli antropologi, sosiologi, hukum, psikologi, politik, dan sebagainya saran tersebut merupakan dorongan sekaligus tantangan untuk menunjukkan kemampuan analitis mereka serta kesiapan mereka untuk memberikan sumbangan pemikiran strategis bagi penyelesaian masalah penting di Indonesia. Tantangan ini juga dapat dimaknai sebagai ajakan untuk menelaah kembali, pemikiran-pemikiran sosial-budaya seperti apa yang telah dihasilkan oleh para ilmuwan Indonesia berkenaan dengan masalah integrasi nasional. Sementara, dukungan yang diberikan dapat ditafsirkan sebagai penghargaan kepada para ilmuwan sosial yang dianggap memiliki kelebihan dalam hal kemampuan untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan masalah kebangsaan yang dihadapi bersama.

Sehubungan dengan itu, dalam tulisan ini saya mencoba untuk mengungkap dan menjelaskan butir-butir pemikiran mengenai masalah integrasi nasional dari seorang ilmuwan sosial-budaya Indonesia yang sangat populer di tahun 1970-1990an, yaitu Koentjaraningrat, Bapak Antropologi Indonesia. Mengapa memilih Koentjaraningrat? Karena menurut saya beliau adalah salah satu dari sedikit mungkin malah satu-satunya ilmuwan sosial Indonesia yang mempunyai perhatian besar terhadap masalah integrasi nasional di Indonesia. Sampai saat ini saya belum berhasil menemukan ilmuwan sosial Indonesia lainnya yang cukup konsisten dan selama karirnya telah menghasilkan sejumlah tulisan yang bervariasi mengenai topik yang sama, sebagaimana halnya Koentjaraningrat.

Mereka yang cukup mengenal tulisan-tulisan Koentjaraningrat tentu akan sepakat bahwa salah satu masalah sosial-budaya di Indonesia yang menjadi perhatian utama beliau yang saya kira sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di masa itu adalah masalah integrasi nasional. Hampir empat puluh tahun telah berlalu semenjak Koentjaraningrat mengemukakan gagasannya mengenai sumbangan antropologi bagi penyelesaian masalah integrasi nasional di Indonesia. Meskipun demikian, sampai saat ini integrasi nasional masih merupakan salah satu masalah utama Indonesia. Pernyataan “NKRI Harga Mati” yang sering kita dengar merupakan ekspresi yang jelas dari kekhawatiran akan terjadinya perpecahan dalam masyarakat, yang akan membahayakan keutuhan NKRI.

Berbagai pertanyaan yang muncul kemudian adalah: masih relevankah pemikiran-pemikiran Koentjaraningrat mengenai integrasi nasional di Indonesia pada abad yang lalu, untuk menyelesaikan masalah yang sama di masa kini, di abad yang berbeda? Jika masih, di mana letak relevansi tersebut? Jika tidak, mengapa demikian? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan saya coba jawab dalam tulisan ini.

II. KOENTJARANINGRAT DAN MASALAH INTEGRASI NASIONAL

Menyimak dengan teliti berbagai tulisan Koentjaraningrat tentang masalah integrasi nasional, kita akan menemukan perbedaan-perbedaan yang cukup jelas antara pemikiran beliau di akhir tahun 1960an dengan pemikiran beliau pada tahun 1990an. Fakta ini mencerminkan paling tidak dua hal. Pertama, pemikiran Koentjaraningrat tidak statis atau mandeg. Artinya, Koentjaraningrat tetap memberikan perhatian pada masalah tersebut, tetapi ada pertanyaan-pertanyaan baru yang diajukan, yang terlihat semakin dalam dan rinci. Kedua, masalah integrasi nasional menjadi masalah yang tampak lebih rumit, lebih kompleks, di mata Koentjaraningrat, seperti halnya masyarakat Indonesia itu sendiri, yang terus tumbuh dan berkembang.

Secara garis besar pemikiran Koentjaraningrat mengenai masalah integrasi nasional dapat kita bagi dalam tiga periode, yaitu masa tahun 1960an, masa tahun 1980an dan masa tahun 1990an.

1. Masa 1960an

Dalam karyanya yang sangat penting mengenai arti antropologi untuk Indonesia yang mungkin tidak lagi banyak dibaca pelajar antropologi masa kini, yaitu *Arti Antro-pologi Untuk Indonesia Masa Ini*, beliau menulis tentang “Tugas-tugas Penelitian Antropologi Indonesia”. Di situ, pada urutan pertama beliau menempatkan “Penelitian-penelitian dalam Rangka Pembentukan Negara Kesatuan Indonesia”. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Koentjaraningrat “Pembentukan Negara Kesatuan Indonesia” merupakan masalah terpenting yang perlu diselesaikan melalui penelitian-penelitian antropologi. Beliau katakan bahwa

“Unsur-unsur penting dalam usaha dan proses membangun Negara kesatuan yang kuat dan sentausa adalah saling pengertian, integrasi dan asimilasi antara suku-suku bangsa dan antara golongan-golongan di Indonesia”.

“Penelitian-penelitian antropologi dapat membantu dalam hal memperbesar pengertian antara suku-bangsa, dengan penelitian mengenai masyarakat dan kebudayaan aneka warna suku-bangsa dengan metode-metode fieldwork yang tajam dan mendalam, serta dengan menyusun bahan yang terkumpul dalam laporan-laporan etnografi”.

“Penelitian antropologi dapat pula membantu dalam hal memperbesar pengertian antara golongan atau lebih konkrit pengertian terhadap golongan penduduk dan warga Negara keturunan Cina, golongan minoriteit yang terpenting diantara kedua golongan mi-noriteit yang lain, ialah Arab dan Indo” (Koentjaraningrat, 1969: 113-114; cetak tebal dari saya)

Kutipan-kutipan di atas memperlihatkan pemikiran Koentjaraningrat mengenai dua hal. Pertama, mengenai faktor-faktor penting untuk membangun Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan, atau untuk menciptakan integrasi nasional di situ. Kedua, mengenai sumbangan yang dapat diberikan oleh disiplin antropologi untuk memperkuat integrasi nasional di kalangan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku-bangsa, dengan budaya yang beranekaragam.

Secara implisit Koentjaraningrat berpendapat bahwa masalah pokok dalam pembentukan Negara Kesatuan Indonesia adalah *kurangnya saling pengertian* di antara warga berbagai

sukubangsa Indonesia mengenai budaya suku-suku yang lain. Oleh karena itu upaya yang diperlukan adalah membangun saling pengertian di antara mereka. Saling pengertian ini kemudian akan mendorong terjadinya integrasi dan asimilasi. Di sinilah menurut beliau antropologi sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan dapat memberikan sumbangan pentingnya, karena para sarjana antropologi telah berpengalaman dalam melakukan penelitian mengenai berbagai sukubangsa di dunia, dan kemudian menuliskannya dalam bentuk karya-karya etnografi, yang kaya dengan berbagai informasi mengenai adat-istiadat sukubangsa-sukubangsa tersebut. Etnografi-etnografi ini akan dapat memunculkan kesadaran dalam diri pembacanya mengenai bu-daya lain yang masih asing baginya, yang kemudian akan memunculkan rasa simpati terhadap budaya tersebut dan sukubangsa yang memilikinya.

Pendapat seperti itu tidak salah, namun melalui perspektif yang lebih kritis kini kita dapat mempertanyakannya kembali. Misalnya saja, apa buktinya bahwa “saling pengertian” merupakan faktor penting untuk membangun negara kesatuan Indonesia yang kuat? Dalam hal ini Koentjaraningrat tidak menyajikan bukti-bukti yang berasal dari hasil penelitian, sehingga apa yang beliau kemukakan sebenarnya masih merupakan hipotesa, atau pernyataan yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Pendapat beliau bersumber dari akal-sehat, sementara pandangan keilmuan mestinya merupakan hasil dari penelitian atau penyelidikan yang lama, yang dikerjakan dengan penuh ketekunan dan ketelitian.

Kalau toh kita menerima pendapat Koentjaraningrat di atas, dapat kita bayangkan betapa sulitnya membangun negara kesatuan Indonesia yang dicita-citakan. Bagaimana tidak? Di Indonesia sekarang berdasarkan atas sensus bahasa daerah- terdapat sekitar 730 bahasa. Hal itu berarti bahwa di Indonesia ada 730 sukubangsa. Jika kita harus membangun saling pengertian sebagaimana yang dibayangkan oleh Koentjara-ningrat, berapa sarjana antropologi kita perlukan untuk melakukan penelitian dan me-nulis etnografi yang cukup baik, yang dapat menciptakan “saling pengertian” yang di-inginkan? Pandangan Koentjaraningrat mungkin cocok untuk mensahkan (melegitima-si) kehadiran dan pengembangan ilmu antropologi di Indonesia, akan tetapi kurang manjur saya kira sebagai obat untuk menciptakan integrasi nasional yang kokoh atau membangun negara kesatuan yang kuat dalam waktu yang relatif pendek.

Dari sisi keilmuan, konsep-konsep yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat juga masih perlu didefinisikan dan dijelaskan maknanya untuk dapat menjadi perangkat analisis yang tajam dan akurat guna menyelesaikan masalah integrasi nasional di Indonesia. Konsep “saling pengertian”, tentu tidak sama maknanya dengan konsep “integrasi” dan “asimilasi”. Meskipun ada titik-titik temu maknawi di antara ketiganya, namun perbedaan-perbedaan maknawinya tetap tidak dapat diabaikan. Pemahaman yang kurang akurat atas perbedaan-perbedaan ini akan menyebabkan terjadinya kerancuan semantis, yang kemudian akan membuat analisis atas masalah integrasi nasional menjadi kurang tepat, dan solusi yang diberikan juga meleset.

Di masa lalu, pandangan Koentjaraningrat di atas tampaknya sudah dapat diterima oleh ilmuwan sosial yang lain, terbukti tidak terdengar adanya diskusi dan perdebatan yang intensif mengenai pandangan tersebut di kalangan mereka. Namun, bisa jadi juga pemikiran tersebut tidak pernah diketahui oleh ilmuwan Indonesia lainnya. Atau, masalah integrasi nasional bukanlah masalah yang dianggap penting oleh para ilmuwan sosial Indonesia ketika itu. Kita tidak tahu mana yang benar.

Merenungkan kembali pendapat Koentjaraningrat di atas, kita akan merasakan betapa masih sederhananya pandangan ilmuwan sosial Indonesia di kala itu, meskipun pemikiran tersebut datang dari seorang tokoh sekaliber Koentjaraningrat. Kini kita menyadari bahwa konsep-konsep yang digunakan oleh Koentjaraningrat ketika itu, seperti “saling pengertian”, “integrasi” dan “asimilasi”, merupakan kata-kata kunci yang tidak sederhana, dan karenanya harus diuraikan maknanya ketika digunakan sebagai perangkat analisis untuk memahami masalah integrasi nasional. Sementara, pada saat itu Koentjaraningrat tidak memberikan definisi yang jelas mengenai makna konsep-konsep penting tersebut.

Pendapat Koentjaraningrat juga terlihat masih belum sangat serius. Artinya, telaah beliau atas persoalan integrasi nasional belum begitu mendalam. Variabel yang berpengaruh terhadap proses integrasi nasional atau pembentukan negara kesatuan Indonesia masih terbatas pada variabel sosial, padahal ketika itu paradigma antropologi yang paling relevan dengan masalah tersebut yaitu paradigma fungsionalisme(struktural) sedang dalam puncak kepopulerannya di kalangan ilmuwan sosial di Barat, dan telah mengemukakan berbagai teori integrasi sosial yang relevan, yang tidak lagi menekankan variabel sosial sebagai variabel yang paling menentukan dalam proses munculnya suatu gejala sosial.

Terlepas dari itu semua, kesadaran akan pentingnya membangun saling pengertian di kalangan suku-sukubangsa di Indonesia mengenai budaya suku yang lain tampaknya telah mendorong Koentjaraningrat meminta sejumlah dosen antropologi kebanyakan adalah mantan mahasiswanya yang “asal dari daerah yang bersangkutan dan yang juga tinggal di daerah itu, atau yang belum lama waktu yang lalu mengunjungi dan melakukan penelitian di daerah yang bersangkutan” (Koentjaraningrat, 1970: viii), untuk menulis budaya suku-sukubangsa tertentu di Indonesia. Mattulada yang orang Bugis kemudian diminta menulis mengenai budaya Bugis, Kodiran yang orang Jawa mendapat tugas menulis mengenai budaya Jawa, Umar Junus yang orang Minang menulis tentang budaya Minangkabau, I Gusti Ngurah Bagus yang orang Bali menulis tentang budaya Bali, dan sebagainya. Kumpulan tulisan mengenai budaya suku-sukubangsa di Indonesia ini kemudian terbit dengan judul *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, dengan Koentjaraningrat tampil sebagai penulis beberapa artikel sekaligus editor buku.

Setelah pernyataannya tentang penguatan integrasi nasional di akhir tahun 1960an di atas, terlihat kekosongan yang cukup lama pada pemikiran Koentjaraningrat mengenai masalah tersebut. Tampaknya beliau disibukkan oleh permintaan dari pemerintah Orde Baru untuk melakukan penelitian-penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah pembangunan di daerah pedesaan. Koentjaraningrat memang me-naruh perhatian besar pada masalah-masalah pembangunan ekonomi, dan antropologi menurutnya sangat diperlukan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Pemikiran Koentjaraningrat tentang perlunya memperhatikan faktor kebudayaan dalam pembangunan ekonomi terlihat dari terbitnya kumpulan tulisan beliau dalam harian Kompas menjadi sebuah buku kecil yang sangat populer, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan* pada pertengahan tahun 1970an.

2. Masa 1980an

Kekosongan pemikiran mengenai masalah integrasi nasional selama kurang lebih lima belas tahun terisi kembali ketika Koentjaraningrat menulis sebuah artikel tentang masalah

tersebut yang dimuat dalam sebuah buku mengenai antropologi terapan yang dieditnya, berjudul *Masalah-Masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan*. Di sini pandangan Koentjaraningrat mengenai masalah integrasi nasional terlihat sudah lebih rinci. Ada empat masalah yang diidentifikasinya termasuk dalam kategori masalah “integrasi nasional”, yaitu: (a) Masalah mempersatukan aneka-warna suku-bangsa; (b) Masalah hubungan antara umat agama; (c) Masalah hubungan mayoritas-minoritas; (d) Masalah integrasi kebudayaan-kebudayaan Irian Jaya dan Timor Timur dengan kebudayaan Indonesia (1982).

a. Masalah Mempersatukan Aneka-Warna Suku-Bangsa

Persatuan di antara aneka-warna sukubangsa di Indonesia dipandang oleh Koentjaraningrat sebagai salah satu masalah integrasi nasional. Pendapat ini muncul karena di sejumlah negara muncul gerakan-gerakan untuk memisahkan diri, membentuk negara baru sendiri, atas dasar kesukubangsaan, sehingga masalah yang dihadapi di sini sebenarnya adalah masalah hubungan antarsukubangsa, yaitu perlakuan satu sukubangsa tertentu mungkin yang mayoritas atau yang tengah berkuasa terhadap sukubangsa yang lain.

Dalam anggapan Koentjaraningrat, perlakuan-perlakuan atau interaksi sosial satu sukubangsa dengan sukubangsa yang lain tersebut didasarkan pada “stereotipe”, sehingga masalah integrasi di sini adalah “masalah merubah prasangka stereotipe etnik antara warga sukubangsa berlainan, yang dalam persaingan mengejar kesempatan bekerja serta pendidikan yang terbatas dapat menimbulkan sikap tegang dan bermusuhan” (Koentjaraningrat, 1982: 348).

Untuk “membina persatuan bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai sukubangsa” tersebut, yang diperlukan kemudian adalah “pengembangan Kebudayaan Nasional Indonesia”, dan ini menyangkut “masalah kepribadian nasional”. Masalah kepribadian nasional “tidak hanya langsung mengenai identitas kita sebagai bangsa, tetapi juga menyangkut soal motivasi kita untuk bersama bersusah payah mengorbankan banyak harta dan tenaga untuk membangun” (Koentjaraningrat, 1982;351).

Sepintas lalu pendapat Koentjaraningrat ini terasa sangat masuk akal, akan tetapi jika ditelaah lebih dalam, terlihat di situ bahwa apa yang dikatakan Koentjaraningrat lebih didasarkan pada pengalaman dan kesan pribadi, bukan pada hasil penelitian yang mendalam mengenai kasus-kasus konflik yang betul-betul terjadi. Padahal, sebagaimana kita tahu, stereotipe-stereotipe mengenai suku-sukubangsa tertentu di Indonesia memang sangat banyak, namun konflik antarsuku yang terjadi malah jarang yang betul-betul disebabkan oleh stereotipe-stereotipe itu sendiri. Bahkan stereotipe tersebut se-ring dijadikan bahan untuk mengolok-olok seseorang yang berasal dari sukubangsa tersebut, tanpa menimbulkan konflik berskala luas.

Jadi, stereotipe-stereotipe bahkan yang negatif sekalipun- bukanlah sebab utama dari konflik antarsuku yang betul-betul terjadi. Jika stereotipe tersebut merupakan penyebab utama konflik tentu sudah sangat banyak konflik antarsuku terjadi di Indonesia. Konflik betul-betul terjadi biasanya karena ada pemicu tertentu yang bersumber antara lain pada persaingan ekonomi atau perbedaan ideologi.

Oleh karena itu solusi yang ditawarkan oleh Koentjaraningrat yaitu pengembangan Kebudayaan Nasional, yang juga berkaitan dengan pembinaan “kepribadian nasional” menjadi terasa seperti mengada-ada, jauh panggang dari api, karena kita tahu bahwa hubungan antara

Kebudayaan Nasional dengan persatuan antarsuku sama sekali tidak bersifat langsung, sehingga apa yang terjadi pada Kebudayaan Nasional belum tentu ada pengaruhnya terhadap integrasi sosial antarsuku. Demikian juga sebaliknya. Konflik antarsuku di Indonesia tidak terlihat pengaruhnya sama sekali terhadap eksistensi dan substansi Kebudayaan Nasional.

Penyelesaian yang ditawarkan oleh Koentjaraningrat juga terasa begitu abstrak, tidak membumi, karena Kebudayaan Nasional di situ terlihat seperti sebuah entitas yang monolitik, utuh, di tingkat nasional. Sementara, masalah hubungan antarsuku berada pada tataran yang paling rendah, tingkat desa atau komunitas. Agar Kebudayaan Nasional dapat terhubung dengan dan menyelesaikan masalah hubungan antarsuku di tingkat lokal ini diperlukan strategi merinci Kebudayaan Nasional menjadi unsur-unsur dan sub-unsur yang dapat turun sampai di tingkat lokal. Tanpa strategi ini, pengembangan Kebudayaan Nasional sebagai upaya untuk meningkatkan persatuan antarsuku di tingkat lokal hanya akan tinggal wacana saja.

b. Masalah Hubungan Antara Umat Agama

Menurut Koentjaraningrat hubungan antar umat agama di Indonesia menyimpan potensi konflik, karena hubungan ini “juga dilatarbelakangi oleh sikap prasangka stereotipe etnik dan dijiwai oleh suasana persaingan yang tajam”, dan “bisa bersifat ekstrem, dan dijiwai oleh emosi yang tak rasional” (Koentjaraningrat, 1982 :355). Berkenaan dengan masalah ini, Koentjaraningrat berpendapat bahwa hubungan antar umat agama “yang paling baik... adalah apabila mereka itu bisa hidup bersama dengan sikap saling bertoleransi”, dan sikap ini akan muncul jika “mereka saling memahami asas-asas agama dari pihak yang lain” (Koentjaraningrat, 1982 :356), atau paling tidak mereka “bisa hidup berdampingan dengan sikap bertoleransi, tanpa banyak saling mencampuri urusan masing masing” (Koentjaraningrat, 1982:357).

Meskipun terasa sangat masuk akal, dan karena itu mudah diterima dan disetujui, namun usulan Koentjaraningrat tersebut belum menyentuh persoalan yang sebenarnya karena pandangan beliau mengenai hubungan antarumat beragama sebenarnya kurang tepat. Bahwa di situ ada “stereotipe etnik dan dijiwai oleh suasana persaingan yang tajam”, hal itu tidak dapat diingkari. Akan tetapi bahwa hal tersebut dianggap terjadi dalam hubungan antar semua umat beragama di banyak tempat di Indonesia, saya kira itu merupakan anggapan yang keliru.

Oleh karena itu, penyelesaian masalah tersebut melalui anjuran untuk “saling mema-hami asas-asas agama dari pihak yang lain” dan “hidup berdampingan dengan sikap bertoleransi”, tidak “mencampuri urusan masing-masing” bukanlah langkah yang tepat dan efektif. Inti masalahnya adalah bagaimana cara membangun hubungan antar-umat beragama yang seperti itu, dan inilah yang luput dari perhatian Koentjaraningrat, karena beliau melihat pola hubungan antarumat beragama yang kurang harmonis sebagai “sebab”, padahal sebenarnya hal itu merupakan “akibat” dari sejumlah faktor sosial-budaya yang lain.

c. Masalah Hubungan Mayoritas-Minoritas

Yang dimaksud oleh Koentjaraningrat dengan golongan minoritas di sini adalah, “warganegara-warganegara Indonesia keturunan Cina” (Koentjaraningrat, 1982:357), dan mayoritasnya tentu saja adalah warganegara Indonesia “pribumi”. Dalam hubungan antara orang Tionghoa di Indonesia dengan penduduk pribumi, Koentjaraningrat menengarai bahwa akibat kebijakan

pemerintah kolonial Belanda, hubungan mereka dengan penduduk pribumi kurang begitu baik setelah kemerdekaan, karena “penduduk pribumi sudah terlanjur mempunyai sikap berprasangka terhadap orang Tionghoa yang didasarkan stereotipe etnik dan suatu sikap curiga terhadap loyalitas nasional dari orang Tionghoa Indonesia, karena sikap acuh tak acuh dari sebagian besar mereka itu terhadap perjuangan orang Indonesia selama zaman revolusi” (Koentjaraningrat, 1982:362).

Di mata Koentjaraningrat masalah hubungan minoritas dengan mayoritas ini, terutama minoritas Tionghoa, “berbeda dengan masalah hubungan antara warganegara dari sukubangsa yang berbeda”. Oleh karena itu, perlu langkah yang lebih jauh lagi, yaitu “menghilangkan identitas Cina dari penduduk Tionghoa di Indonesia” (Koentjaraningrat, 1982:364). Pernyataan ini tentu cukup mengejutkan jika kita tempatkan dalam situasi dan kondisi Indonesia yang sekarang, tetapi yang dimaksud oleh Koentjaraningrat dengan hal itu adalah, “integrasi nasional, terutama integrasi dalam sektor ekonomi dan sosial dan integrasi kebudayaan (khususnya bahasa dan kesenian) ke dalam kebudayaan sukubangsa sekelilingnya. Kekhususan dalam kebudayaan etnik Tionghoa dapat dipertahankan dalam gaya hidup dan keagamaannya (Kong-Fu-Tsu atau Budha-Cina).” (Koentjaraningrat, 1982:364)

Berkenaan dengan identitas kebudayaan Cina ini Koentjaraningrat berpendapat, bahwa “Identitas kebudayaan dalam arti sepenuhnya tak dapat dipertahankan pada su-kubangsa Tionghoa di Indonesia, seperti misalnya identitas etnik pada sukubangsa yang lain. Hal ini karena berbeda dengan sukubangsa di Indonesia yang lain”. Apa perbedaan tersebut? “...lokasi dari kebudayaan Cina yang harus menjadi pusat orientasi untuk identitas tersebut berada di luar wilayah negara Indonesia. Mempertahankan identitas kebudayaan Cina pada sukubangsa Tionghoa di Indonesia akan menimbulkan masalah-masalah politik yang membahayakan” (p.364).

Pendapat Koentjaraningrat ini mungkin akan mengejutkan sebagian dari kita karena terlihat berlawanan dengan apa yang terjadi sekarang. Perlu diingat, bahwa pernyataan Koentjaraningrat tersebut dikemukakan pada awal tahun 1980an, ketika persatuan dan kesatuan nasional belum sepenuhnya stabil, dan ingatan mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di tahun 1950-1960an masih sangat kuat. Penafsiran atas pernyataan Koentjaraningrat tersebut perlu disertai dengan pemahaman yang mendalam tentang situasi dan kondisi sosial-ekonomi-politik-kebudayaan di masa itu, tentang posisi orang Tionghoa dalam masyarakat Indonesia terutama di Jawa dan posisi Koentjaraningrat sebagai ilmuwan sosial-budaya, guru besar antropologi di sebuah universitas negeri ter-kemuka, serta peneliti senior yang berpengaruh di Lembaga Ilmu Pengetahuan milik negara.

Analisis Koentjaraningrat mengenai hubungan orang Cina dengan masyarakat pribumi Indonesia pada umumnya menurut saya merupakan analisis yang paling baik dalam tulisan itu. Koentjaraningrat dapat mengidentifikasi beberapa faktor penyebab relasi yang kurang baik antara orang Cina dengan masyarakat pribumi. Meskipun demikian perlu diingat di sini bahwa pendapat Koentjaraningrat lebih berlaku di Jawa daripada di tempat lain. Di Sulawesi Utara, di Kalimantan Barat atau di pulau Bangka dan Belitung, relasi masyarakat pribumi dengan orang-orang Cina relatif baik, kalau tidak sangat baik.

Oleh karena itu, hasil analisis Koentjaraningrat perlu diterima dengan hati-hati. Pendapat beliau belum tentu berlaku di tempat lain di luar Jawa. Bahkan di Jawa pun juga ada daerah-daerah atau kota-kota di mana hubungan antara orang Cina dengan masyarakat pribumi baik-baik saja.

d. Masalah Integrasi Kebudayaan-Kebudayaan Irian Jaya Dan Timor Timur Dengan Kebudayaan Indonesia

Meskipun mencantumkan nama Timor Timur pada judul sub-bab tulisannya, tetapi Koentjaraningrat ternyata tidak membahas sama sekali tentang integrasi Timor Timur. Saya tidak tahu apa yang membuat Koentjaraningrat tidak melakukannya, padahal Timor Timur belum lepas dari Indonesia ketika itu. Pembicaraan beliau hanya mengenai masalah integrasi Irian Jaya, yang kini disebut “Papua”.

Menurut beliau, secara politik “masalah integrasi Irian sudah tercapai, dalam arti bahwa Irian Jaya sudah menjadi bagian integral dari negara Indonesia; integrasi ekonomi kini sudah selesai, namun integrasi kebudayaan belum tercapai”, dan ini dapat menimbulkan jarak sosial “antara penduduk Irian Jaya dengan penduduk Indonesia lainnya, yang mungkin bisa mempunyai akibat negatif lagi terhadap integrasi politik yang sudah tercapai itu” (Koentjaraningrat, 1982 :366-367)

Ada satu ciri umum di kalangan penduduk Irian Jaya, menurut Koentjaraningrat, yang penting untuk diperhatikan, yaitu “cita-cita penduduk Irian untuk membentuk suatu masyarakat atau suatu negara sendiri, bebas dari dominasi orang lain yang tidak mereka anggap sebagai keturunan dari nenek moyang mereka, ialah ciri kepekaan terhadap “gerakan pemimpin adil”. Ciri ini erat sangkut-pautnya dengan “konsep tentang suatu negara Irian yang merdeka”, oleh karena itu Koentjaraningrat menyimpulkan bahwa “hal itu dapat mengganggu proses integrasi Irian Jaya ke dalam persatuan nasional Indonesia” (Koentjaraningrat, 1982 :368).

Untuk mengatasi masalah integrasi nasional di Irian Jaya, Koentjaraningrat mengemukakan bahwa di situ perlu diwujudkan pemerintahan yang “dapat dianggap oleh penduduknya sebagai suatu pemerintah sendiri”, “suatu pemerintah yang tidak mereka pandang asing, yang tidak mereka curigai dan yang mereka anggap adil seperti pemimpin adil yang mereka idam-idamkan itu”. Pemerintahan tersebut harus berusaha membuat Irian Jaya (Papua) menjadi “propinsi yang dalam segala lapangan, bidang dan lapangan, bidang dan lapisan kehidupan ekonomi, profesional, organisasi sosial dan administrasi pemerintahan dapat diurus oleh putra Irian sendiri”. Selain itu, pemerintah Indonesia harus bersaing dengan pemerintah Papua Nugini dalam pengaturan ekonomi dan administrasi, yang ketika itu masih dibina dan dilindungi oleh Australia (Koentjaraningrat, 1982: 368-369).

Dibandingkan dengan gagasan-gagasan sebelumnya, ide Koentjaraningrat mengenai penguatan integrasi nasional di Papua ini saya kira merupakan ide yang paling jelas dan cukup membumi, yaitu menyentuh kehidupan sehari-hari orang Papua. Hal itu tidak terlepas dari pemahaman Koentjaraningrat sendiri tentang masalah integrasi nasional di Papua, yang di sini terasa lebih jelas dan lebih dekat dengan kenyataan. Meskipun memerlukan waktu yang lama untuk mewujudkannya, akan tetapi cara menguatkan integrasi nasional di Papua terlihat lebih mungkin untuk diwujudkan dengan segera di sana.

3. Masa 1990an

Memasuki tahun 1990, minat Koentjaraningrat terhadap masalah integrasi nasional tidak mengendor, dan ini membuat Koentjaraningrat terlihat seperti satu-satunya ilmuwan sosial Indonesia yang paling konsisten menaruh perhatian pada masalah integrasi nasional, yang

tampaknya sangat terkait dengan dari hasil pengamatannya atas berbagai peristiwa politik di beberapa negara lain. Kata Koentjaraningrat, “Suatu gejala penting yang terdapat dalam berbagai peristiwa di dunia selama dua dasawarsa terakhir adalah timbulnya gerakan-gerakan etnik, dengan adanya sukubangsa-sukubangsa dan golongan-golongan etnik yang menuntut ekonomi yang lebih besar ataupun kemerdekaan dari negara tempat mereka bermukim sebagai warga negaranya.” (Koentjaraningrat, 1993: 1) Oleh karena itu, Koentjaraningrat kemudian juga tertarik pada masalah kesukubangsaan atau etnisitas (*ethnicity*).

“Kajian tentang kesukubangsaan bahkan lebih penting, karena sebagian besar dari negara-negara di dunia bersifat multietnik. Di antara sekitar 175 negara anggota Perse-rikatan Bangsa-Bangsa, hanya 12 negara yang penduduknya kurang-lebih homogen. Karena itu jelas” tandas Koentjaraningrat, “bahwa masalah kesukubangsaan merupakan masalah global” (Koentjaraningrat, 1993: 3).

Tidak mengherankan jika pandangan Koentjaraningrat mengenai masalah integrasi nasional kemudian terlihat menitik lebih dalam. Hal ini juga dimungkinkan oleh adanya kesempatan untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut secara komparatif dan lebih mendalam. Sebagaimana telah saya sampaikan, bagi Koentjaraningrat masalah integrasi nasional adalah masalah hubungan antarsukubangsa. Lantas, apa fokus perhatian beliau dalam penelitian beliau mengenai masalah tersebut? Tulis beliau, “saya memfokuskan perhatian pada ada atau tidaknya kemungkinan bahwa negara yang multietnik memperkuat kesatuan bangsa tanpa menghilangkan kebudayaan-kebudayaan sukubangsa, maka kebijakan-kebijakan budaya apakah yang harus diupayakan oleh negara multietnik untuk mempertahankan kesatuan nasional?” (Koentjaraningrat, 1993: 3)

Koentjaraningrat melihat bahwa ada banyak negara yang multietnik, yang warganya terdiri dari berbagai macam sukubangsa. Negara seperti ini tentunya menghadapi masalah mempersatukan berbagai macam sukubangsa tersebut di bawah payung sebuah sistem politik yang diakui dan diterima bersama. Dalam proses penyatuan tersebut Koentjaraningrat secara implisit berpendapat bahwa budaya-budaya sukubangsa tersebut sebaiknya tidak dihilangkan. Jika demikian, bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan?

Sehubungan dengan itu, muncul persoalan kedua, yang lebih berkaitan dengan peran antropologi dalam penyelesaian masalah tersebut. Di sini Koentjaraningrat secara implisit berpendapat bahwa antropologi perlu memberikan sumbangan pemikiran pada tataran kebijakan. Dari sini muncullah pertanyaan berikutnya: kebijakan seperti apa yang harus dibuat oleh negara dalam proses penyatuan berbagai sukubangsa tersebut dalam sebuah negara? Jika pertanyaan pertama dapat dijawab, maka dengan sendirinya pertanyaan kedua juga akan terjawab.

Pandangan yang mendasari penelitian Koentjaraningrat mengenai integrasi sosial adalah bahwa “Masalah kebhinekaan sukubangsa dan kesatuan nasional di Indonesia telah menunjukkan kepada kita bahwa suatu negara berkembang besar yang multietnik memerlukan suatu kebudayaan nasional untuk mengintensifkan perasaan identitas nasional dan solidaritas nasional di antara warganya..” (Koentjaraningrat, 1993: 29). Akan tetapi pandangan itu perlu diuji lagi, dan Koentjaraningrat mencoba melakukan studi perbandingan dengan India, sebuah negara yang multietnik juga, untuk menguji kebenaran pendapat tersebut.

a. Sejarah Nasional Yang Panjang

Dari studi perbandingan yang terbatas itu, Koentjaraningrat menyimpulkan, “Kajian ini (studi perbandingan India dan Indonesia) telah menunjukkan bahwa suatu sejarah nasional yang panjang dengan kasus-kasus kesatuan nasional, integrasi sukubangsa, dan toleransi keagamaanlah yang membuat rakyat dan para pemimpin negara-negara multietnik mengacu dan meningkatkan integrasi nasional, selanjutnya mencegah konflik etnik dan agama, dan merupakan suatu faktor penting untuk meningkatkan kesatuan nasional dan solidaritas nasional” (Koentjaraningrat, 1993: 50)

Apa saran Koentjaraningrat berkenaan dengan butir ini? Tidak begitu jelas. Tampaknya beliau tidak mempunyai gambaran atau pemikiran tentang bagaimana “sejarah nasional yang panjang tersebut dapat terbentuk”, dan jika ada bagaimana menjadikannya sebagai salah satu faktor yang dapat memperkuat integrasi nasional. Lagi-lagi penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh Koentjaraningrat di sini kurang mengena, sebagai akibat dari kesalahan analisisnya, yaitu melihat fenomena “akibat” sebagai “sebab”. Sejarah nasional yang panjang bukanlah “penyebab” dari keberhasilan tokoh-tokoh masyarakat meningkatkan integrasi nasional, tetapi merupakan akibat dari sebuah proses sosial budaya ekonomi dan politik yang perlu dianalisis lebih tajam lagi agar dapat dilihat keterkaitannya dengan faktor-faktor penyebabnya, dan dampaknya terhadap integrasi nasional.

Selanjutnya, pendapat bahwa pencegahan konflik etnik dan agama merupakan faktor penting dalam peningkatan integrasi nasional, merupakan pendapat yang tidak banyak maknanya, karena semua orang sudah tahu hal itu. Masalah yang lebih penting adalah bagaimana pencegahan itu dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan cara yang tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Mengenai hal ini Koentjaraningrat tidak menyatakan pendapatnya, sehingga kita sebenarnya belum memperoleh gambaran strategi apa dan bagaimana yang diusulkan oleh Koentjaraningrat untuk mencegah konflik etnis dan agama, yang kemudian akan dapat menguatkan integrasi nasional.

b. Bahasa Nasional dan Identitas Nasional

Berkenaan dengan Bahasa Nasional dan identitas nasional ini Koentjaraningrat mengajukan proposisi: (1) “bahwa pembentukan suatu kebudayaan nasional yang kuat meningkatkan identitas nasional”; (2) “bahwa adanya suatu bahasa nasional mengintensifkan kesatuan nasional”. Dua proposisi ini kemudian beliau uji kebenarannya dengan mempelajari dua negara dengan sejarah nasional yang berbeda dan integrasi nasionalnya juga berbeda, yaitu Belgia dan Yugoslavia. Masing-masing negara memiliki beberapa persamaan dengan Indonesia, namun Belgia dapat tetap bertahan sebagai sebuah negara, sedang Yugoslavia kemudian terpecah-pecah menjadi beberapa negara. Proposisi-proposisi ini sangat relevan dengan masalah integrasi nasional Indonesia di masa-masa yang lalu, yang memang mengkhawatirkan, karena belum cukup kuat, dan Indonesia ternyata mengikuti pandangan yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, yaitu memperkuat bahasa nasional, bahasa Indonesia, yang sekaligus juga menjadi identitas nasional.

Dari hasil kajian atas negara Yugoslavia, yang kini telah bubar, Koentjaraningrat meninggalkan pesan mengenai tiga hal yang perlu dihindari agar disintegrasi tidak terjadi, yaitu, pertama, menghindari “upaya memaksakan konsep mengenai nilai-nilai budaya kepada penduduk

yang kita pandang “terbelakang”. Pesan ini tampaknya beliau sampaikan sehubungan dengan masih terjadinya pemaksaan nilai-nilai budaya tertentu pada suku-sukubangsa yang dianggap masih terbelakang di Indonesia, yang kemudian ditafsirkan sebagai pemaksaan nilai budaya milik sukubangsa yang sedang berkuasa atau yang mayoritas.

Kedua, menghindari mendiskriminasi sesama warga bangsa Indonesia. Menurut Koentjaraningrat hal ini masih cukup sering terjadi, terutama terhadap warganegara Indonesia keturunan Tionghoa. Ketiga, menghindari pembiaran terjadinya proses “kesenjangan antara daerah yang cepat maju dengan yang lambat maju” menjadi “terlalu besar” (Koentjaraningrat, 1993: 68). Melebarnya kesenjangan antardaerah ini akan dapat ditafsirkan sebagai kurangnya perhatian pemerintah pada upaya-upaya yang ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian berbagai kelompok dan komunitas di Indonesia, yang dapat berujung pada upaya melepaskan diri dari NKRI.

Lagi, gagasan-gagasan Koentjaraningrat tentang penguatan integrasi nasional terlihat sangat masuk akal. Akan tetapi itu semua ternyata tidak selalu ada hubungannya dengan masalah kebahasaan, yang seharusnya beliau bahas dan tunjukkan strateginya agar integrasi nasional yang lebih kokoh kemudian dapat tercipta. Di sini terlihat bahwa Koentjaraningrat sendiri tidak mempunyai ide yang jelas dan mudah diterapkan berkenaan dengan bahasa sebagai faktor penguat integrasi nasional. Hal ini tampaknya merupakan akibat dari kurang tajamnya analisis beliau atas keterkaitan antara kehadiran bahasa nasional dengan integrasi nasional. Indonesia sebenarnya merupakan sebuah contoh yang bagus dari keterkaitan ini, sayang hal ini belum betul-betul ditelaah secara mendalam oleh para ilmuwan sosial-budaya.

c. Peran Pemimpin dan Tokoh Masyarakat

Berkenaan dengan peran pemimpin dan tokoh masyarakat dalam penguatan integrasi nasional, ada pernyataan Koentjaraningrat yang menarik, yang saya kira sangat relevan dengan situasi di Indonesia sekarang. Beliau menulis, “Dalam pembahasan mengenai ketakutan yang universal terhadap dominasi permanen oleh sukubangsa-sukubangsa atau bangsa lainnya, suatu pertanyaan bisa muncul: dalam suatu masyarakat multietnik, sebenarnya kategori sosial manakah yang merasakan ancaman itu?”. Menurut beliau mereka adalah “para pemimpin, para ahli politik dan kaum intelektual terkemuka, yang dapat mengekspresikan ketakutan-ketakutan mereka melalui media massa” (Koentjaraningrat, 1993: 57). Ekspresi ketakutan ini bisa merupakan akibat dari situasi dan kondisi yang nyata ada dalam masyarakat, tetapi bisa juga merupakan rekayasa yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan politis tertentu, yang dapat melemahkan integrasi nasional.

Oleh karena itu, Koentjaraningrat berkesimpulan bahwa “walaupun keadaan tidak adanya toleransi etnik, linguistik, agama, ras atau kasta dapat menghambat integrasi dalam suatu masyarakat multietnik, kemauan dari sebagian terbesar para pemimpin, ahli politik, kaum intelektual dan masyarakat pers untuk tetap bersatulah yang sebenarnya membuat suatu negara bersatu”. (Koentjaraningrat, 1993: 57). Kesimpulan ini sangat relevan dengan apa yang sering kita dengar dari televisi atau baca di surat kabar di Indonesia.

Ketika politisi, ulama, pengamat politik berbicara mengenai situasi dan kondisi di Indonesia, dan mereka memiliki agenda politik tertentu, maka komentar-komentar mereka seringkali adalah

rekayasa tafsiriah (interpretif), yang ditujukan bukan untuk menyelesaikan masalah tetapi untuk menimbulkan keresahan masyarakat, ketakutan sosial. Ketakutan sosial ini diharapkan akan dapat memunculkan kondisi sosial-psikologis tertentu yang akan memudahkan tercapainya tujuan politik mereka. Di sisi lain, tanpa mereka sadari, hal itu telah membuat integrasi nasional tergerus.

Masalahnya kemudian adalah bagaimana kita bisa membuat para pemimpin atau lebih tepatnya para politisi mendahulukan integrasi nasional, persatuan dan kesatuan Indonesia, daripada mendahulukan kepentingan golongan, suku, agama atau agenda partai politik mereka? Pertanyaan inilah yang belum dijawab oleh Koentjaraningrat dalam pembahasannya.

Secara umum terlihat di sini bahwa Koentjaraningrat lebih menekankan sisi “lunak” (soft) kebudayaan untuk menyelesaikan berbagai masalah integrasi nasional. Siasat ini bukan tanpa arti atau tidak memberikan hasil, akan tetapi juga bukan merupakan cara yang tepat dan akurat untuk menyelesaikan persoalan integrasi nasional. Seandainya saja Koentjaraningrat memberikan perhatian dan penekanan yang seimbang pada “tiga wujud kebudayaan” yang hampir selalu dikemukakannya dalam berbagai forum ilmiah, solusi-solusi yang ditawarkannya akan lebih komprehensif dan mungkin juga lebih efi-sien dan efektif.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Paparan mengenai perkembangan perhatian Koentjaraningrat terhadap masalah integrasi nasional di atas menunjukkan kepada kita beberapa hal. Pertama, perhatian Koentjaraningrat terhadap masalah integrasi nasional tidak pernah surut semenjak tahun 1960-an. Hal ini setidaknya mencerminkan nasionalisme dan perhatian beliau yang besar terhadap keberlangsungan NKRI. Kedua, beliau ingin menunjukkan bahwa ilmu sosial, khususnya antropologi, dapat memberikan sumbangan pemikiran yang penting dan nyata untuk penguatan persatuan dan kesatuan dalam sebuah negara bangsa. Ketiga, secara tersirat beliau menyampaikan pesan bahwa ilmuwan sosial di negeri yang tengah berkembang seperti Indonesia, sebaiknya memainkan peran aktif dalam mem-bangun negeri dengan menyumbangkan saran dan pemikiran untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial-budaya di situ. Keempat, pemikiran tentang masalah sosial-budaya perlu dikembangkan melalui perenungan dan penelitian yang tekun dan serius, sebagaimana telah beliau tunjukkan.

Sementara itu, telaah atas isi pemikiran Koentjaraningrat mengenai integrasi nasional menunjukkan hal yang lain lagi. Pertama, analisis beliau mengenai masalah tersebut terlihat semakin rinci, semakin dalam. Kedua, pemikiran beliau sangat menekankan pada pentingnya pengembangan atau pembentukan kebudayaan nasional untuk penguatan identitas nasional, yang dapat memayungi berbagai kebudayaan etnis atau daerah. Ketiga, pemikiran beliau kurang menampilkan variabel-variabel yang lebih “materialistis”, yang dapat memengaruhi integrasi nasional. Keempat, pemikiran beliau juga mencerminkan pandangan yang memperlakukan kebudayaan sebagai suatu entitas dengan batas-batas yang cukup jelas satu dengan yang lain, yang pendukung-pendukungnya kurang memiliki relasi dengan pendukung kebudayaan yang lain. Model masyarakat yang beliau sajikan adalah model masyarakat ‘plural’, *plural society*, sebagaimana yang digambarkan oleh Furnivall (1939). Kelima, pemikiran Koentjaraningrat mempertentangkan

konsep ‘integrasi nasional’ dengan konsep disintegrasi seperti hitam dan putih dengan garis batas yang tegas, sementara realitas sosialnya tidak demikian. Keenam, Koentjaraningrat lebih memerhatikan persoalan bagaimana memperkuat integrasi nasional, dan kurang memerhatikan hal-hal yang dapat melemahkan integrasi tersebut, padahal menghilangkan faktor yang melemahkan ini juga berarti menguatkan integrasi sosial itu sendiri. Ketujuh, Koentjaraningrat menggunakan istilah “masalah integrasi nasional” untuk menampung berbagai macam gejala dan persoalan yang sebenarnya tidak dapat ditempatkan dalam satu kategori. Pada satu waktu, “masalah integrasi nasional” tersebut dimaknai sebagai bidang-bidang di mana terdapat relasi sosial yang kurang bagus antarkategori sosial; pada waktu yang lain, “masalah” tersebut dimaknai sebagai faktor-faktor yang menghambat integrasi nasional; pada waktu yang lain lagi, “masalah” tersebut dimaknai sebagai faktor-faktor yang mendorong terjadinya integrasi nasional.

Corak pemikiran seperti itu tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya, tetapi kekurangannya lebih banyak daripada kelebihannya. Di antaranya adalah, pertama, aspek material dari kebudayaan yang mempunyai potensi lebih besar untuk menguatkan integrasi sosial- terabaikan, sehingga strategi kebudayaan yang disarankan terasa kurang membumi, kurang mudah dilaksanakan. Kedua, kemungkinan dibentuknya relasi-relasi sosial baru untuk mengubah corak sosial masyarakat plural (majemuk) melalui strategi kebudayaan yang lebih menekankan pada aspek infrastruktur kurang mendapat perhatian, sehingga potensinya untuk menguatkan integrasi sosial terabaikan. Ketiga, Koentjaraningrat belum pernah setahu saya membicarakan tentang apa yang beliau maksud dengan “integrasi nasional” dan “disintegrasi nasional”, sehingga muncul model hitam putih untuk memandang dua fenomena tersebut, yang kurang mencerminkan situasi dan kondisi sosial yang sebenarnya, yang bersifat relatif. Akibatnya, strategi penguatan integrasi nasional yang disarankan tidak terlihat utuh. Keempat, analisis atas “masalah integrasi nasional” menjadi kurang tajam, sehingga usulan untuk penyelesaiannya menjadi kurang tajam juga dan kurang komprehensif. Kelima, dan ini yang menurut saya paling mengejutkan mengingat Koentjaraningrat adalah seorang pakar antropologi, kealpaan beliau untuk memerhatikan fungsi perkawinan antarsuku, antar golongan sosial yang berbeda terhadap integrasi nasional. Mestinya beliau memberikan pandangan tentang sumbangan positif perkawinan antarsuku dalam proses integrasi nasional, dan bagaimana hal tersebut dapat didorong atau dipopulerkan dalam masyarakat.

Kelemahan-kelemahan di atas tidaklah berarti bahwa pemikiran Koentjaraningrat mengenai integrasi nasional di Indonesia sudah tidak relevan lagi. Justru sebaliknya. Dengan menelaah kembali pemikiran tersebut kita menjadi semakin sadar bahwa masalah integrasi nasional masih tetap akan merupakan salah satu masalah pokok bangsa Indonesia sampai beberapa tahun mendatang, dan hal itu mencerminkan kemampuan Koentjaraningrat untuk membayangkan situasi, kondisi dan problem yang akan dihadapi bangsanya di masa-masa ketika beliau tidak lagi berada di dalamnya.

Sebagian gagasan beliau tentang siasat untuk memperkuat integrasi nasional di Indonesia saya kira masih relevan; masih dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang muncul di masa kini, seperti masalah integrasi orang Cina di beberapa tempat di Indonesia, masalah pengembangan Kebudayaan Nasional, masalah peran pemimpin dalam penguatan integrasi nasional, dan sebagainya. Adalah tugas generasi ilmuwan sosial-budaya setelah Koentjaraningrat untuk menelaah kembali gagasan-gagasan beliau secara kritis, memperbaikinya dan mengembangkannya, agar

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan bangsa Indonesia dan umat manusia pada umumnya.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil diskusi di atas, beberapa saran dapat dikemukakan di sini. Pertama, generasi ilmuwan sosial-budaya setelah Koentjaraningrat perlu menelaah kembali gagasan-gagasan beliau secara kritis untuk menemukan kelebihan-kelebihan serta kekurangan di dalamnya, baik pada aspek teoretis maupun penerapannya. Kelebihan-kelebihan yang ada dapat terus dimanfaatkan, sementara kekurangan-kekurangannya kemudian dapat dihindari atau diperbaiki lagi.

Kedua, penelitian-penelitian mengenai masalah integrasi nasional tetap perlu dilakukan karena hasilnya tidak hanya akan dimanfaatkan untuk penguatan integrasi nasional, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pelemahan integrasi tersebut. Penelitian-penelitian seperti ini tidak hanya akan memberikan manfaat praktis tetapi juga manfaat teoretis, terutama pada bidang ilmu pemerintahan, serta pada cabang-cabang ilmu sosial lain seperti ilmu politik, sosiologi, dan antropologi.

Ketiga, penelitian-penelitian tersebut sebaiknya diarahkan pada bidang-bidang atau aspek-aspek integrasi nasional yang masih belum sempat diteliti dengan lebih mendalam oleh Koentjaraningrat, seperti aspek infrastruktur, aspek ekonomi, aspek hukum, atau pada bidang-bidang seperti kesenian, agama, komunikasi, dan sebagainya. Dalam hal ini para peneliti sosial di Indonesia memiliki ladang penelitian yang sangat luas untuk digarap, karena masalah integrasi nasional masih akan merupakan salah satu masalah sosial penting di Indonesia hingga mungkin beberapa puluh tahun mendatang, dan variasi permasalahan yang muncul juga akan sangat bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ahimsa-Putra, H.S. 1991. “

_____ . (1999a). *Kemajemukan Budaya, Demokrasi, Komunikasi dan Integrasi Nasional*. Makalah seminar nasional “Public Relations Untuk Partai Politik”, AKINDO, di Yogyakarta, 10 April.

_____ . (1999c). *Pluralitas, Demokratisasi dan Integrasi Nasional*. Makalah dalam Internship Ketahanan Nasional, Program Studi Ketahanan Nasional, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 7 Oktober.

_____ . (2002b). “Pluralitas Budaya dan Kekerasan Massal: Adakah Hubungannya?” dalam *Integrasi, Moral Bangsa dan Perubahan*, Sumijati As dkk (eds.). Yogyakarta; Sinergi Press.

_____ . (2007). *Kemajemukan Budaya di Indonesia: Bagaimana Menyikapinya?*. Makalah seminar “Peran Pemuda Nusantara Menyikapi Pluralitas Budaya Daerah Untuk Kelestarian Budaya Bangsa” diselenggarakan oleh IKPMD Indonesia Yogyakarta, di Yogyakarta, 24 Februari.

- _____. (2008). *Pluralism without Multiculturalism*. Makalah konferensi internasional “Towards An Inclusive Democratic Indonesian Society” diselenggarakan oleh Universitas Atma Jaya, di Yogyakarta, 18-19 Juli.
- _____. (2009). *Dari Plural ke Multikultural: Tafsir Antropologi Atas Masyarakat Indonesia*. Makalah lokakarya “Multikulturalisme dalam Pembangunan di Indonesia”, diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, di Yogyakarta, 12 Agustus.
- _____. (2013). ”Budaya Bangsa, Jati Diri dan Integrasi Nasional: Sebuah Teori”. *Jejak Nusantara. Edisi Perdana*. Tahun I : 6-19.
- _____. (2015). *Membangun Multikulturalisme dan Membangun Indonesia*. Makalah disampaikan dalam seminar nasional “Multikultur Pendukung Pembangunan Nasional”, diselenggarakan oleh Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas, Negeri Gorontalo, di Gorontalo, 18 Nopember.
- Furnival, J.S. (1939). *Netherlands India*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Koentjaraningrat. (1969). *Arti Antropologi untuk Indonesia Masa Ini*. Djakarta: LIPI
- _____. (1971). “Kata Pengantar” dalam *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, Koentjaraningrat (ed.). Jakarta: Djambatan.
- _____. (1974). *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- _____. (1982). “Lima Masalah Integrasi Nasional” dalam *Masalah-Masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan*, Koentjaraningrat (peny.). Jakarta: LP3ES.
- _____. (1993). *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. Jakarta: UI Press.